

Pengawasan OJK Yang Lemah Picu Maraknya Investasi Ilegal

Tanggal : Jum'at , 23 Oktober 2020

Media : Koran Jakarta

Halaman : 1

Wartawan : SB, E-9

Muatan Berita : Netral

Narasumber : Wibisono Hardjopranoto (*Pengamat ekonomi dari Universitas Surabaya*), Luthfy Zain Fuady (*Direktur Penyidikan OJK*), Amir Uskara (*Anggota Komisi XI DPR RI*)

Rubrik : Nasional

Topik : Investasi Ilegal

Perlindungan Konsumen

Pengawasan OJK yang Lemah Picu Maraknya Investasi Ilegal

JAKARTA - Maraknya investasi ilegal atau bodong menyebabkan banyak masyarakat yang menjadi korban kehilangan uang yang ditempatkan pada perusahaan yang menjalankan bisnis investasi yang tidak jelas. Bahkan dalam kurun waktu sepuluh tahun, dari 2009 hingga 2019, nilai investasi ilegal mencapai 92 triliun rupiah.

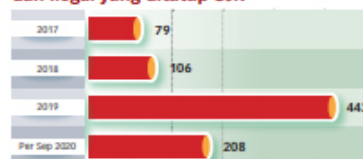
Menanggapi maraknya investasi bodong tersebut, Pakar Ekonomi dari Universitas Surabaya, Wibisono Hardjopranoto, Kamis (22/10), mengatakan maraknya investasi ilegal menunjukkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kurang bisa menjalankan perannya dalam menertibkan fenomena tersebut.

Selain gagal menertibkan menjamurnya perusahaan-perusahaan investasi ilegal, OJK juga kurang mampu mengedukasi masyarakat tentang potensi kerugian dari tarakan investasi ilegal yang menggurikan.

"Kurang galak. OJK seperti tidak punya gigi. Memang by design OJK bisa berkilah sanksinya ada pada sistem peradilan. Tetapi terlepas dari itu, penyisiranannya (terhadap pelanggaran) sangat kurang sehingga tangkapannya hanya sedikit. Jadi seperti kena satu, tumbuh seribu," kata Wibisono.

Seharusnya, OJK mempunyai agen-agen yang memantau dunia maya, agar bisa mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat untuk investasi yang berpotensi merugikan.

Perkembangan Investasi Bodong dan Ilegal yang ditutup OJK



Sumber: Satgas Waspada Investasi OJK - Litbang E. J/gnd
NORIN JAKARTA, CBSI

"Peran OJK ini harus dipertajam, apalagi sekarang makin banyak asuransi bodong, harus rajin mengeksekusi dan membongkar. Literasi finansial di Indonesia memang sangat lemah, sehingga publik mudah tergour jika ada tawaran menarik," katanya.

OJK harus sering mengekspos hasil-hasil temuan, tidak perlu menunggu pengadilan. Mereka adalah lembaga negara yang diberi kewenangan. "Percuma saja kalau tidak melakukannya, publik yang jadi korban," pungkasnya.

Lebih Proaktif

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Amir Uskara, juga meminta OJK agar lebih proaktif mencari tahu masalah-masalah seputar sektor jasa keuangan yang sangat berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

"Sektor jasa keuangan sangat penting memelihara kepercayaan publik, kalau banyak persoalan dibiarkan tanpa penanganan yang komprehensif, maka lama kelamaan tingkat kepercayaannya pudar," kata Amir.

Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal IA OJK, Luthfy Zain Fuady, dalam seminar Capital Market Summit & Expo 2020 di Jakarta, Kamis (22/10), mengatakan terus mengedukasi masyarakat untuk menekan kasus investasi ilegal yang nilainya sangat fantastis.

"Ini jumlah yang tidak sedikit. Apalagi kita bandingkan dengan pertumbuhan *market cap* kita, per tahunnya mencapai angka 100 triliun rupiah agak berat juga. Artinya, jumlah ini jumlah yang tidak kecil," kata Luthfy.

Untuk itu, berbagai upaya perlu dilakukan, baik dari perbaikan regulasi, penguatan kewenangan, dan upaya-upaya koordinasi. ■ SB/E-9